

## **IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNGKU (GERBANGKU) DI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE**

**Oleh:**

David Laiyan <sup>1</sup>, Bambang Tri Harsanto <sup>2</sup>, Retna Dyah Puspita <sup>3</sup>

E-mail; davedoank05@gmail.com

Imu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke

### **Abstrak**

Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung

## **PENDAHULUAN**

Sejak digulirkannya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001), maka penyelenggaraan otonomi khusus harus berorientasi pada pembangunan daerah di Papua yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan harus berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan yang berasal dari masyarakat di kampung. Pemerintah daerah mulai menjalankan program pembangunan yang disebut sebagai Gerakan Pembangunan Kampungku (GERBANGKU), yang mulai digulirkan berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 16 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Program GERBANGKU pada 20 distrik dan 160 kampung dalam wilayah Kabupaten Merauke.

Program ini mempunyai beberapa tujuan utama yaitu: 1) Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sekaligus melestarikan hasil kerja pembangunan yang dilaksanakan di kampung; 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatis dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal; 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan kampung dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan di kampung yang berkelanjutan; 4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang menjadi prioritas di kampung. Dalam pelaksanaan program GerbangKu beberapa masalah yang muncul yaitu jumlah pendamping GerbangKu tidak sepenuhnya berada pada setiap kampung-kampung, padahal sudah selayaknya para pendamping harus berada di setiap kampung guna memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat dalam merancang program-program GerbangKu yang bermanfaat bagi kampung tersebut, hal lain menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam Program GerbangKu yang terlihat dalam kegiatan musyawarah kampung yang jelas sangat bertolak belakang dengan salah satu tujuan dalam GerbangKu yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di kampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku (GERBANGKU) di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Kampungku (GERBANGKU) di distrik Jagebob kabupaten Merauke; 2) Melakukan evaluasi terhadap implementasi Program Gerakan Pembangunan Kampungku (GERBANGKU) di distrik Jagebob kabupaten

Merauke; 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Gerakan Pembangunan Kampungku (GERBANGKU) di distrik Jagebob kabupaten Merauke.

Desentralisasi sebagai salah satu sistem untuk membagi kekuasaan pemerintah antara pusat dan daerah membuka sebuah peluang adanya sikap untuk dapat mengontrol jalannya sebuah kekuasaan dalam negara. Karena melalui desentralisasi dapat mengurangi penggunaan kekuasaan secara berlebihan, sehingga distribusi manfaat dari kekuasaan dapat dirasakan tidak hanya pada tataran kekuasaan di tingkat pusat ataupun lembaga pelaksana saja melainkan kekuasaan juga dapat dipergunakan untuk mengatur dan memproyeksikan kebutuhan daerah yang dilakukan di tingkat pemerintah bersama dengan pemuka politik di daerah yang akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan tersebut (Montgomery,1972). Desentralisasi dilihat dari perspektif administrasi publik sebagai pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, pengelolaan dan meningkatkan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat kepada instansi dalam lingkup pemerintah daerah, lembaga unit publik semi-otonom dan fungsional serta lembaga non-pemerintah atau organisasi swasta.

Desentralisasi mengisyaratkan dengan jelas bahwa guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu ada mekanisme pembagian bahkan penyerahan wewenang dalam suatu pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kondisi ini pada prinsipnya untuk memberikan ruang kinerja yang maksimal kepada pemerintah daerah dalam mengelolah dan mengatur segala bentuk sumber daya (alam dan manusia) yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakatnya. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerinah daerah menghasilkan sebuah konsekuensi yang jelas yakni pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam mengatur dan mengelolah daerahnya sendiri. Kondisi ini sudah jelas menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, karena pembangunan akan diarahkan kepada kepentingan daerah khususnya kebutuhan masyarakat (Rondinelli,2007).

Konsep kebijakan publik dilihat juga dari sudut pandang dalam sebuah negara yang memiliki masyarakat yang heterogen pasti mempunyai banyak harapan dan tuntutan yang akan terus disuarakan kepada pemerintah. Secara tanggungjawab pemerintah bertugas untuk menyerap dan menampung semua aspirasi yang berasal dari masyarakat dan kepentingan para pelaku politik serta sumber daya yang ada guna memenuhi tuntutan dan kepentingan tersebut. Namun tidak semuanya dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, karena disebabkan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tuntutan itu, maka pemerintah akan melakukan penyaringan terhadap kepentingan dan tuntutan yang ada. Kondisi ini menghasilkan tuntutan yang akan langsung dipenuhi, ditunda dan disingkirkan, maka hasil dari serangkaian penyaringan dan

penentuan ini yang disebut sebagai kebijakan publik (Wibawa *et all*,1994). Model implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle (1980), ide dasar yang menjadi fokus pemikiran dalam teori ini adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah dilakukan, maka implementasi kebijakan dilakukan (Wibawa *et all*,1994). Ide dasar dari model implementasi ini adalah setelah suatu kebijakan ditransformasikan maka masuk pada tahapan implementasi, sehingga kondisi ini menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan publik tergantung pada *implementability* (isi dan konteks) dari kebijakan tersebut.

Dalam pemikiran Grindle terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu variabel isi kebijakan yang di dalamnya melihat (a) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (b) jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (c) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan karena suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit dilaksanakan daripada program yang sekedar memberikan bantuan materi kepada kelompok sasaran masyarakat; (d) kondisi lokasi pelaksanaan program kebijakan; (e) situasi sumber daya yang memadai sebagai dukungan terhadap implementasi kebijakan dimaksud. Variabel konteks implementasi mencakup (a) seberapa besar jumlah kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (b) karakteristik lembaga dan pemegang penguasa; (c) tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dimaksud (Subarsono,2013). Seluruh aspek yang dijabarkan dalam pemikiran di atas erat hubungannya dengan interaksi yang terpadu dan saling dukung diantara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun, melaksanakan dan pengawasan terhadap suatu kebijakan, sehingga menghasilkan suatu keselarasan hubungan yang konstruktif dalam implementasi kebijakan dimaksud (Wibawa *et all*,1994);

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Metode penelitian yang akan gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskripsi

kuantitatif merupakan penelitian yang menyajikan tahap yang lebih lanjut dari observasi. Setelah memiliki seperangkat skema klasifikasi seperti itu, penyelidik kemudian mengukur besar atau distribusi sifat-sifat antara para anggota kelompok tertentu dan muncul peranan teknik-teknik statistik di dalamnya (Silalahi, 2012). Di dalamnya juga terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisikondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Pasolong, 2012).

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Distrik Jagebob yang merupakan distrik di Kabupaten Merauke yang telah melaksanakan program Gerakan Pembangunan KampungKu (GERBANGKU).

#### **Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini yaitu aspek isi kebijakan dan konteks implementasi dari implementasi program Gerakan Pembangunan KampungKu (GERBANGKU) pada dua kampung di Distrik Jagebob.

#### **Sumber Data**

Terdapat dua sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Data primer adalah dokumen original (material mentah) yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa tersebut terjadi “*first-hand information*” (Silalahi, 2012). Data tersebut diperoleh melalui kuesioner, observasi serta data-data yang berkaitan dengan program GERBANGKU; 2) Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia “*second-hand information*” (Silalahi, 2012). Data yang dikumpulkan dapat melalui komentar, interpretasi, pembahasan serta dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan penelitian dimaksud.

#### **Informan Penelitian**

Untuk teknik penentuan informan dilakukan secara *Proportionate Random Sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan apabila unsur-unsur satuan anggota populasi yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (berimbang) dalam setiap strata berbanding lurus dengan unsur-unsur satuan anggota populasi dalam strata yang bersangkutan. Ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian yang dapat dipergunakan yakni penelitian deskriptif minimal 10% populasi dan untuk penelitian yang relatif kecil minimal 20% dari populasi (Pasolong, 2012). Adapun informan yang dianggap representatif adalah masyarakat yang merupakan berasal dari kampung Angger Permegi dan kampung Poo yang berada dalam wilayah Distrik Jagebob yang secara langsung merasakan program GERBANGKU.

#### **Teknik Mengumpulkan Data**

Adapun tekni pengumpulan data yang digunakan adalah 1) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab

(Sugiyono, 2014); 2) Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolong, 2012); 3) Dokumentasi yaitu dengan melihat data-data yang sudah dibuat laporan secara administratif (Arikunto, 2006).

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu 1) *Editing* merupakan pemeriksaan atas kesalahan atau kekurangan dalam setiap hasil jawaban kuesioner yang telah terkumpul; 2) *Coding* merupakan proses pemberian tanda dengan angka atau simbol atas semua jawaban yang terdapat dalam kuesioner; 3) Tabulasi data merupakan proses peringkasan data ke dalam bentuk yang rapih dan bisa dilakukan secara manual dan elektronik untuk kepentingan analisis lebih lanjut (Pasolong, 2012); 4) Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi serta data penelitian akan diolah dan dianalisis menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows versi 20*.

#### **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel isi kebijakan berada pada kategori sedang yakni 46,6% dan variabel konteks implementasi berada juga pada kategori sedang dengan persentase 69,7%. Maka dalam pelaksanaannya program GERBANGKU dirasakan belum maksimal manfaatnya oleh masyarakat kampung serta program ini juga belum maksimal mendorong dan memberikan perhatian kepada pemberdayaan masyarakat guna keberkelanjutan program pembangunan di kampung Hal ini menghadirkan fakta bahwa masyarakat kampung menilai implementasi program GERBANGKU dilapangan dari sisi pelaksanaan program dan derajat perubahan yang diinginkan belum maksimal dilakukan dan belum bisa dirasakan perubahan yang maksimal dalam kehidupan masyarakat di kampung. Fakta lain juga menunjukkan bahwa masyarakat kampung menilai implementasi program GERBANGKU dilapangan dari sisi karakteristik lembaga dan penguasa yang terlibat dalam program belum dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang semestinya, sehingga masyarakat kampung belum maksimal merasakan keberpihakan dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kampung melalui pelaksanaan program GERBANGKU selama ini.

#### **PEMBAHASAN**

Program Gerbangku, paradigma pembangunan terpusat dapat mulai tergeser menjadi pembangunan untuk masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan dana dari pemerintah. Jika dievaluasi dari tujuan GERBANGKU, peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sekaligus melestarikan hasil kerja



pembangunan yang dilaksanakan di kampung; pelemagaan pengelolaan pembangunan partisipatis dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal; dan pengembangan kapasitas pemerintahan kampung dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan di kampung yang berkelanjutan; maka pembangunan dengan tata kelola ini memerlukan pemberdayaan masyarakat yang kuat. Komunikasi dalam hal ini berhubungan dengan proses komunikasi antara pihak pemerintah baik di tingkat distrik dan kampung dengan masyarakat kampung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya kegiatan pembangunan kampung dalam program GERBANGKU.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program GERBANGKU yaitu 1) Komunikasi yang dirasakan selama ini oleh masyarakat bahwa proses komunikasi hanya berlangsung dalam forum formal saja dan belum maksimal mendorong proses komunikasi aktif melalui pendekatan informal terhadap masyarakat kampung; 2) Karakteristik wilayah kampung menyangkut situasi dan kondisi wilayah kampung baik dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh kampung maupun sisi sosial budaya dalam kampung tersebut. Kondisi wilayah kampung di distrik Jagebob saling berbeda satu sama lain, sehingga membuat kebutuhan kampung akan program GERBANGKU dan kemampuan kampung juga akan saling berbeda.

Hal ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program GERBANGKU di kampung, sehingga dapat menghasilkan kegiatan pembangunan kampung yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kampung guna mendorong kegiatan pembangunan kampung menjadi lebih maksimal; 3) Pendampingan masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendampingan masyarakat kampung dalam program GERBANGKU yang belum dilakukan maksimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten Merauke untuk menjadi petugas pendamping GERBANGKU. Pendampingan terhadap masyarakat kampung membutuhkan perhatian yang optimal karena dengan demikian dapat membantu masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan program GERBANGKU di kampung; 4) Interaksi program dan masyarakat berhubungan dengan kehadiran program-program GERBANGKU yang cenderung statis di kampung. Program GERBANGKU dirasakan belum memberikan ruang interaksi yang maksimal kepada masyarakat untuk menciptakan program yang berkelanjutan guna pemberdayaan sumber daya kampung. Kondisi ini membuat program GERBANGKU yang dijalankan oleh masyarakat kampung setiap periodenya mengalami kesamaan yang membuat masyarakat menjadi jenuh dan kurang peduli karena telah mengetahui bentuk program GERBANGKU dimaksud sehingga masyarakat hanya akan menunggu datangnya program bukan menyiapkan program yang akan dijalankan dalam GERBANGKU.

## PENUTUP

Proses pelaksanaan program Gerakan Pembangunan KampungKu (GERBANGKU) di distrik Jagebob yang telah berjalan hanya semata-mata untuk menjawab terlaksananya program-program yang telah ditetapkan namun belum mampu menjadikan program GERBANGKU sebagai bagian dari keinginan pemerintah kabupaten Merauke untuk menciptakan sebuah instrumen pembangunan kampung yang memberdayakan kampung. Dalam program GERBANGKU selanjutnya perlu didorong hadirnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kampung, sehingga tidak lagi menganggap sama kondisi dan permasalahan yang dihadapi seluruh kampung tersebut. Penempatan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong pelaksanaan program GERBANGKU yang berdaya guna serta mampu memunculkan kemandirian dan keberkelanjutan dalam pembangunan masyarakat kampung. Diharapkan pula dalam program GERBANGKU selanjutnya diberikan perhatian kepada jenis-jenis program yang dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat kampung serta bisa menghadirkan program perberdayaan masyarakat khusus bagi kaum muda dan perempuan di kampung.

## AFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, Jakarta: Rinek Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Rondinelli, Dennis A & Cheema, Shabbir G. 2007. *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*, Washington DC: Brookings Institution Press.



- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: APIPI dan Puslit K2PW Lembaga Penelitian Unpad.
- Wibawa, Samodra et all. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.